

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak atau berorientasi pada kepentingan umum sehingga organisasi ini tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya, walaupun tujuan akhirnya tidak berorientasi pada laba, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Sistem manajemen yang baik dan benar dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yang diperlukan setiap organisasi baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta. Salah satu elemen atau indikator yang penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran.

Anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Menurut Mahmudi (2016), anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa mendatang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan serta program kerja dan aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Pemahaman manajer tentang tujuan dan informasi anggaran memberikan dasar bagi manajer untuk mengukur efisiensi, masalah dan mengendalikan biaya.

Proses penyusunan anggaran yang dilakukan berbeda antara penyusunan anggaran di sektor swasta dan penyusunan anggaran di sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah atau sektor publik anggaran yang dibuat harus diinformasikan

kepada publik atau masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kritikan dan masukan, sedangkan pada sektor swasta anggaran merupakan salah satu bagian rahasia pada perusahaan yang sebisa mungkin harus tertutup untuk publik. Anggaran dibuat dan disusun oleh kepala daerah dengan usulan-usulan dari unit-unit kerja, yang disampaikan kepada kepala bagian yang nantinya akan diusulkan kepada kepala daerah. Selanjutnya DPRD akan menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

Dalam menyusun rencana kerja masing-masing program harus memuat semua rincian dan uraian mengenai nama program, tujuan, sasaran program, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, alokasi serta indikator kerja. Setelah semua program dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya akan diserahkan kepada panitia Eksekutif. Panitia Eksekutif yang nantinya akan memulai menganalisis dan menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja, selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan perancangan Draft kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas oleh pihak legislatif (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Tahap penganggaran menjadi salah satu indikator yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Kinerja pendapatan dinilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan adalah batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, karena anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Bastian (2010), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ukuran kinerja organisasi sangatlah penting, yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi dan perencanaan dimasa yang akan datang. Ada beberapa jenis informasi yang disiapkan guna menjamin bahwa pekerjaan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian pengukuran kinerja tidak hanya berfokuskan pada informasi finansial saja tetapi juga pada informasi nonfinansial.

Kinerja pemerintahan daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan (Halim dan Kusufi, 2012).

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok (Davis dan Newstrom, 2004). Mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Sajogy (2002), mendefinisikan partisipasi

sebagai suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra, punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses pengambilan keputusan bersama yang dilakukan oleh dua bagian atau lebih, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak dimasa yang akan mendatang. Partisipasi penyusunan anggaran yang dipergunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi yaitu komitmen suatu organisasi.

Fenomena yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saat ini ialah berkaitan dengan kinerjanya yang dinilai kurang baik, terbukti dengan adanya kritikan yang ditujukan kepada Gubernur yang belum genap setahun tetapi telah banyak menuai kritikan negatif, adanya Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Babel, diketahui berawal dari kurang mampunya OPD dalam mengembangkan tugas yang telah diberikan (Bangka Pos, 2018), selain itu adanya perubahan istilah yang semula berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi daya tarik tersendiri.

Pada penelitian kali ini akan di fokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berda di Kabupaten Bangka Barat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangka Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat perumusan masalah yaitu: Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berhubungan positif terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bangka Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bangka Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pustakaan dan mampu memberikan kontribusi akademisi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi pada pengembangan teori, terutama di bidang yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintahan Khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya dalam penyusunan anggaran pada PEMDA di Kabupaten Bangka Barat.

c. Kontibusi Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi PEMDA di Kabupaten Bangka Barat, sebagai sebuah bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan dan menentukan arah strategi didalam perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dimasa mendatang.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap penyusunan anggaran yang ada di dinas-dinas Kabupaten Bangka Barat.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari laporan dari partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi data yang digunakan, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahsan masalah yang akan diteliti yaitu gambar objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUPAN

Penelitian ini dinagi atas lima bab yang secara sistematika terdiri dari Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi penelitian.

